



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pergeseran anggaran dilaksanakan dalam keadaan tertentu untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan anggaran;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dan DAK Fisik, penyesuaian sub kegiatan belanja pegawai pada beberapa perangkat daerah, penyesuaian belanja lainnya, dan menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023, bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk pendanaan Kelurahan ditentukan berdasarkan satuan biaya per Kelurahan dan jumlah Kelurahan tiap-tiap Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan angka 17 huruf a, huruf f, Penyusunan Perubahan APBD, huruf F, Teknik Penyusunan APBD Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meliputi pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk selanjutnya dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar,

berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran oleh pejabat yang berwenang, Bupati mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 13);
31. Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 10);
32. Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 60);
33. Peraturan Bupati Banjar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp1.557.825.883.637,00 (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
 - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp920.429.859.575,00 (sembilan ratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp573.752.087.518,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.505.641.544,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus lima juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.138.295.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp920.429.859.575,00 (sembilan ratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp535.188.633.173,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.152.157.286,00 (dua ratus dua puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.630.397.295,00 (seratus dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.089.798.505,00 (dua puluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.100.665.316,00 (satu miliar seratus juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.416.208.000,00 (enam miliar empat ratus enam belas juta dua ratus delapan ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp535.188.633.173,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;

- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp401.711.213.483,00 (empat ratus satu miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.209.673.746,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.869.779.730,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.955.613.686 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.871.667.957,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.198.734.751,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.575.155.619,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.294.602,00 (dua belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp950.119.389,00 (sembilan ratus lima puluh juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar 2.834.380.210 (dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah).
 - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.152.157.286,00 (dua ratus dua puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.025.962.883,00 (seratus lima miliar dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.092.639.010,00 (lima belas miliar sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.007.520.989 (delapan miliar tujuh juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.130.761.523 (lima miliar seratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).

- (6) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp90.895.272.881 (sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
5. Ketentuan ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.100.665.316,00 (satu miliar seratus juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - i. Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - j. Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.975.520,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.446.200,00 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.676,00 (empat ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
 - (10) Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp830.953.260,00 (Delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah).
 - (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp99.237.500,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp573.752.087.518,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.816.791.471,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.434.252.597,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.941.904.078,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tujuh puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.564.015.912,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus enam puluh empat juta lima belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.812.106.500,00 (dua miliar delapan ratus dua belas juta seratus enam ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.177.776.620,00 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp83.005.240.340,00 (delapan puluh tiga miliar lima juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.816.791.471,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.747.581.471,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.210.000,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (12) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.434.252.597 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*);
 - k. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - l. Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.370.365.155 (seratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.294.079.957,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.615.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.307.255.250,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.095.692.832,00 (dua miliar sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp38.520.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.445.182.912,00 (sebelas miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
 - (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.985.511.780,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
 - (11) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
 - (12) Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp12.855.029.711,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
9. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.941.904.078,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp472.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.200.544.281,00 (delapan belas miliar dua ratus juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.409.786.440,00 (sepuluh miliar empat ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp25.761.573.257,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp1.042.953.100,00 (satu miliar empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah).

10. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp63.564.015.912,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus enam puluh empat juta lima belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah).

11. Ketentuan ayat (1). Ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp328.726.011.867,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.565.003.412,00 (lima miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.546.287.638,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.739.534.962,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp177.832.232.755,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.042.953.100,00 (satu miliar empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah).

12. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (8) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.546.287.638,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.241.000,00 (seratus enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.789.289.480,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.296.754.785,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.909.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.113.996.996,00 (empat miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp144.988.500,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - (8) Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.882.860.200,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.708.987.920,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.715.910.477,00 (lima miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
 - (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp406.649.000,00 (empat ratus enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.595.700.280,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.706.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam juta rupiah).
13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.789.289.480,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.589.309.480,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.980.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.296.754.785,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.139.400,00 (lima puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.864.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp206.751.385,00 (dua ratus enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

15. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.909.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah), yaitu berupa Belanja Modal Alat Pengolahan, terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman; dan
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.909.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e dengan nama Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp4.113.996.996,00 (empat miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp816.605.496,00 (delapan ratus enam belas juta enam ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.682.887.500,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp614.504.000,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus empat ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Belanja Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp144.988.500,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yaitu berupa Belanja Modal Alat Studio, terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Studio Audio;
 - b. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film; dan
 - c. Belanja Modal Alat Studio Lainnya
- (2) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.751.500,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.356.000,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.881.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.882.860.200,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.159.880.900,00 (tiga puluh enam miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp722.979.300,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

19. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.708.987.920,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika; dan
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.284.967.920,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.299.600.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.420.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.715.910.477,00 (lima miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.446.053.257,00 (empat miliar empat ratus empat puluh enam juta lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.269.857.220,00 (satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh dua ratus dua puluh rupiah).

21. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
 - b. Belanja Modal Alat SAR (*Search dan Rescue*).
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR (*Search dan Rescue*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

22. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Belanja Modal Alat Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp406.649.000,00 (empat ratus enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang berupa Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

23. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.595.700.280,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

24. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.706.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam juta rupiah).

25. Ketentuan Pasal 69 dihapus.

26. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) dan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.739.534.962,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
- b. Belanja Modal Monumen;
- c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.056.194.702,00 (tujuh puluh empat miliar lima puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah).

(3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp296.750.100,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus rupiah).

(5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp356.590.160,00 (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah).

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.056.194.702,00 (tujuh puluh empat miliar lima puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.938.370.477,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.117.824.225,00 (tiga miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

28. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp177.832.232.755,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), terdiri dari:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp158.827.939.860,00 (seratus lima puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.062.772.895,00 (delapan belas miliar enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp941.520.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a sebesar Rp158.827.939.860,00,00 (seratus lima puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.

- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.922.044.217,00 (seratus lima belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
 - (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.905.895.643,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
30. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.062.772.895,00 (delapan belas miliar enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai /Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
 - (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.515.749.500,00 (sepuluh miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.244.061.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta enam puluh satu ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.302.962.395,00 (lima miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
31. Ketentuan Pasal 78 dihapus.
32. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp941.520.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

33. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan nama Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah).

34. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

35. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 Juni 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 21

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.300.000.000	250.300.000.000	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	95.037.929.649	95.037.929.649	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	300.000.000	300.000.000	0	0 %
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	10.000.000	10.000.000	0	0 %
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	10.000.000	10.000.000	0	0 %
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	60.317.080	60.317.080	0	0 %
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	60.317.080	60.317.080	0	0 %
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	229.682.920	229.682.920	0	0 %
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	229.682.920	229.682.920	0	0 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.295.567.118	2.295.567.118	0	0 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.080.567.118	2.080.567.118	0	0 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.080.567.118	2.080.567.118	0	0 %
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	15.000.000	15.000.000	0	0 %
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	15.000.000	15.000.000	0	0 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0 %
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0 %
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0 %
4.1.01.11	Pajak Parkir	792.362.531	792.362.531	0	0 %
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	792.362.531	792.362.531	0	0 %
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	792.362.531	792.362.531	0	0 %
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	300.000.000	300.000.000	0	0 %
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	300.000.000	300.000.000	0	0 %
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	300.000.000	300.000.000	0	0 %
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.300.000.000	2.300.000.000	0	0 %
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.300.000.000	2.300.000.000	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.300.000.000	2.300.000.000	0	0 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.800.000.000	9.800.000.000	0	0 %
4.1.01.15.01	PBBP2	9.800.000.000	9.800.000.000	0	0 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	9.800.000.000	9.800.000.000	0	0 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	36.200.000.000	36.200.000.000	0	0 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	36.200.000.000	36.200.000.000	0	0 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	36.200.000.000	36.200.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	8.385.320.000	8.385.320.000	0	0 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.893.900.000	1.893.900.000	0	0 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	700.000.000	700.000.000	0	0 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	700.000.000	700.000.000	0	0 %
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	686.900.000	686.900.000	0	0 %
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	686.900.000	686.900.000	0	0 %
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	52.000.000	52.000.000	0	0 %
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	52.000.000	52.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	455.000.000	455.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	455.000.000	455.000.000	0	0 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.485.420.000	1.485.420.000	0	0 %
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	656.936.000	656.936.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	51.336.000	51.336.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	300.000.000	300.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	168.000.000	168.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	87.600.000	87.600.000	0	0 %
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	60.000.000	60.000.000	0	0 %
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	60.000.000	60.000.000	0	0 %
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	88.050.000	88.050.000	0	0 %
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	88.050.000	88.050.000	0	0 %
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	295.000.000	295.000.000	0	0 %
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	295.000.000	295.000.000	0	0 %
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	190.000.000	190.000.000	0	0 %
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	190.000.000	190.000.000	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.550.000	1.550.000	0	0 %
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.550.000	1.550.000	0	0 %
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.320.000	10.320.000	0	0 %
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.320.000	10.320.000	0	0 %
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	183.564.000	183.564.000	0	0 %
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	60.000.000	60.000.000	0	0 %
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	123.564.000	123.564.000	0	0 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.006.000.000	5.006.000.000	0	0 %
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.887.500.000	4.887.500.000	0	0 %
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	4.887.500.000	4.887.500.000	0	0 %
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	18.500.000	18.500.000	0	0 %
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	18.500.000	18.500.000	0	0 %
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.498.156.214	22.498.156.214	0	0 %
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	22.498.156.214	22.498.156.214	0	0 %
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.398.156.214	5.398.156.214	0	0 %
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.398.156.214	5.398.156.214	0	0 %
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	17.100.000.000	17.100.000.000	0	0 %
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	17.100.000.000	17.100.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	124.378.594.137	124.378.594.137	0	0 %

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	127.124.783	127.124.783	0	0 %
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	127.124.783	127.124.783	0	0 %
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	127.124.783	127.124.783	0	0 %
4.1.04.05	Jasa Giro	6.959.595.963	6.959.595.963	0	0 %
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.959.595.963	6.959.595.963	0	0 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.959.595.963	6.959.595.963	0	0 %
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	98.512.606.048	98.512.606.048	0	0 %
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	98.512.606.048	98.512.606.048	0	0 %
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	98.512.606.048	98.512.606.048	0	0 %
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	18.779.267.343	18.779.267.343	0	0 %
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.779.267.343	18.779.267.343	0	0 %
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.779.267.343	18.779.267.343	0	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.907.783.203.428	1.907.783.203.428	0	0 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.784.552.925.590	1.784.552.925.590	0	0 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.569.373.188.590	1.569.373.188.590	0	0 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	489.991.280.590	489.991.280.590	0	0 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	20.448.582.660	20.448.582.660	0	0 %
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	8.905.488.780	8.905.488.780	0	0 %
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	149.088.420	149.088.420	0	0 %
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.898.076.000	2.898.076.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	456.065.476.740	456.065.476.740	0	0 %
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	395.448.060	395.448.060	0	0 %
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.129.119.930	1.129.119.930	0	0 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	720.930.446.000	720.930.446.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0001	DAU	720.930.446.000	720.930.446.000	0	0 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	129.314.504.000	129.314.504.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.186.225.000	1.186.225.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	22.063.791.000	22.063.791.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.275.904.000	1.275.904.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	989.180.000	989.180.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	4.469.555.000	4.469.555.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	20.445.125.000	20.445.125.000	0	0 %

KABUPATEN BANJAR

RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	14.171.753.000	14.171.753.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	8.322.342.000	8.322.342.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	2.015.620.000	2.015.620.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	54.375.009.000	54.375.009.000	0	0 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	229.136.958.000	229.136.958.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	53.888.990.000	53.888.990.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.760.000.000	3.760.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	104.725.537.000	104.725.537.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.344.750.000	2.344.750.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.166.784.000	3.166.784.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	9.367.590.000	9.367.590.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	8.706.500.000	8.706.500.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.470.153.000	8.470.153.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	524.596.000	524.596.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	24.646.259.000	24.646.259.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	459.100.000	459.100.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	8.321.124.000	8.321.124.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	755.575.000	755.575.000	0	0 %
4.2.01.05	Dana Desa	215.179.737.000	215.179.737.000	0	0 %
4.2.01.05.01	Dana Desa	215.179.737.000	215.179.737.000	0	0 %
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	215.179.737.000	215.179.737.000	0	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.230.277.838	123.230.277.838	0	0 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	123.230.277.838	123.230.277.838	0	0 %
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	123.230.277.838	123.230.277.838	0	0 %
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	31.220.879.177	31.220.879.177	0	0 %
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.678.239.745	14.678.239.745	0	0 %
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	54.062.381.460	54.062.381.460	0	0 %
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	650.000.000	650.000.000	0	0 %
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	22.618.777.456	22.618.777.456	0	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.036.000.000	3.036.000.000	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.036.000.000	3.036.000.000	0	0 %
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.036.000.000	3.036.000.000	0	0 %

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.036.000.000	3.036.000.000	0	0 %
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.036.000.000	3.036.000.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	2.161.119.203.428	2.161.119.203.428	0	0 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.772.715.598.337	1.557.825.883.637	(214.889.714.700)	12 %
5.1.01	Belanja Pegawai	920.429.859.575	920.429.859.575	0	0 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	535.688.454.557	535.188.633.173	(499.821.384)	0 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	403.266.360.976	401.711.213.483	(1.555.147.493)	0 %
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	334.814.621.776	333.306.657.843	(1.507.963.933)	0 %
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	68.451.739.200	68.404.555.640	(47.183.560)	0 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	36.195.508.793	36.209.673.746	14.164.953	0 %
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	29.042.815.560	29.074.980.513	32.164.953	0 %
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.152.693.233	7.134.693.233	(18.000.000)	0 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.611.821.375	7.869.779.730	257.958.355	3 %
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.611.821.375	7.869.779.730	257.958.355	3 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	27.568.481.988	27.955.613.686	387.131.698	1 %
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	27.410.981.988	27.798.113.686	387.131.698	1 %
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	157.500.000	157.500.000	0	0 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.874.769.275	9.871.667.957	(3.101.318)	0 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.898.904.025	5.895.802.707	(3.101.318)	0 %
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.975.865.250	3.975.865.250	0	0 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	22.186.359.694	22.198.734.751	12.375.057	0 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.884.434.898	16.896.809.955	12.375.057	0 %
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.301.924.796	5.301.924.796	0	0 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.184.174.460	1.575.155.619	390.981.159	33 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.184.174.460	1.525.155.619	340.981.159	29 %
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.692.092	12.294.602	602.510	5 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.671.964	5.245.481	573.517	12 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.020.128	7.049.121	28.993	0 %
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	22.000.000.000	22.000.000.000	0	0 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	22.000.000.000	22.000.000.000	0	0 %
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	950.984.770	950.119.389	(865.381)	0 %
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	792.767.960	791.902.579	(865.381)	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	158.216.810	158.216.810	0	0 %
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.838.301.134	2.834.380.210	(3.920.924)	0 %
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.368.262.516	2.364.341.592	(3.920.924)	0 %
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	470.038.618	470.038.618	0	0 %
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	223.652.335.902	224.152.157.286	499.821.384	0 %
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	104.698.947.678	105.025.962.883	327.015.205	0 %
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	82.153.149.518	82.435.316.723	282.167.205	0 %
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	22.545.798.160	22.590.646.160	44.848.000	0 %
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	15.071.884.010	15.092.639.010	20.755.000	0 %
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	3.393.804.010	3.414.559.010	20.755.000	1 %
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	11.678.080.000	11.678.080.000	0	0 %
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.558.118.135	8.007.520.989	449.402.854	6 %
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	7.401.416.135	7.850.818.989	449.402.854	6 %
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	156.702.000	156.702.000	0	0 %
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.022.455.042	5.130.761.523	(891.693.519)	15 %
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	4.956.551.662	5.048.175.523	91.623.861	2 %
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	1.065.903.380	82.586.000	(983.317.380)	92 %
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	90.300.931.037	90.895.272.881	594.341.844	1 %
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	82.068.521.037	81.594.429.501	(474.091.536)	1 %
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	8.232.410.000	9.300.843.380	1.068.433.380	13 %
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	123.630.397.295	123.630.397.295	0	0 %
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.430.345.507	3.430.345.507	0	0 %
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	161.000.000	161.000.000	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	338.100.000	338.100.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.232.762	3.232.762	0	0 %
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	92.396.576	92.396.576	0	0 %
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.107.664.381	1.107.664.381	0	0 %
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	31.892.592	31.892.592	0	0 %
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	10.093.863	10.093.863	0	0 %
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.071.286	1.071.286	0	0 %
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	92.575.000	92.575.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	324.444.047	324.444.047	0	0 %
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.267.875.000	1.267.875.000	0	0 %
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.151.740.788	2.151.740.788	0	0 %
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.873.341.000	1.873.341.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	26.162.500	26.162.500	0	0 %
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	26.741.875	26.741.875	0	0 %
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	2.415.000	2.415.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	3.544.013	3.544.013	0	0 %
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	62.388	62.388	0	0 %
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	218.729.387	218.729.387	0	0 %
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	744.625	744.625	0	0 %
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	104.725.537.000	104.725.537.000	0	0 %
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	104.725.537.000	104.725.537.000	0	0 %

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.166.784.000	3.166.784.000	0	0 %
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	3.166.784.000	3.166.784.000	0	0 %
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.344.750.000	2.344.750.000	0	0 %
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.344.750.000	2.344.750.000	0	0 %
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	90.000.000	90.000.000	0	0 %
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	90.000.000	90.000.000	0	0 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.592.240.000	7.637.240.000	45.000.000	1 %
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.697.385.000	5.689.225.000	(8.160.000)	0 %
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.894.855.000	1.948.015.000	53.160.000	3 %
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	129.000.000	84.000.000	(45.000.000)	35 %
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	45.000.000	0	(45.000.000)	100 %
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	84.000.000	84.000.000	0	0 %
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.089.798.505	29.089.798.505	0	0 %
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000	1.004.010.000	0	0 %
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000	1.004.010.000	0	0 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400	140.561.400	0	0 %
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400	140.561.400	0	0 %
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200	156.427.200	0	0 %
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200	156.427.200	0	0 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000	86.058.000	0	0 %
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000	86.058.000	0	0 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500	1.455.814.500	0	0 %
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500	1.455.814.500	0	0 %
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	138.486.600	138.486.600	0	0 %
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	138.486.600	138.486.600	0	0 %
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000	5.670.000.000	0	0 %
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000	5.670.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000	1.417.500.000	0	0 %
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000	1.417.500.000	0	0 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	28.302.005	28.302.005	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	28.302.005	28.302.005	0	0 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.374.368.800	9.389.368.800	15.000.000	0 %
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	261.482.400	261.482.400	0	0 %
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.721.600	2.721.600	0	0 %
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	8.164.800	8.164.800	0	0 %
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.102.000.000	9.117.000.000	15.000.000	0 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.348.000.000	9.348.000.000	0	0 %
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.348.000.000	9.348.000.000	0	0 %
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	270.270.000	255.270.000	(15.000.000)	6 %
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	270.270.000	255.270.000	(15.000.000)	6 %
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.100.665.316	1.100.665.316	0	0 %
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000	54.600.000	0	0 %
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000	54.600.000	0	0 %
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000	7.644.000	0	0 %
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000	7.644.000	0	0 %
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000	98.280.000	0	0 %
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000	98.280.000	0	0 %
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040	7.975.520	(135.520)	2 %
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040	7.975.520	(135.520)	2 %
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.313.676	1.446.200	132.524	10 %
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.313.676	1.446.200	132.524	10 %
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.680	4.676	2.996	178 %
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.680	4.676	2.996	178 %
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040	131.040	0	0 %
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040	131.040	0	0 %
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120	393.120	0	0 %
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120	393.120	0	0 %
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan	830.953.260	830.953.260	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Pajak Daerah				
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	39.000.000	39.000.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	81.900.000	81.900.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	783.092	783.092	0	0 %
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	22.381.779	22.381.779	0	0 %
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	268.316.217	268.316.217	0	0 %
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	7.725.535	7.725.535	0	0 %
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.445.097	2.445.097	0	0 %
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	259.504	259.504	0	0 %
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	22.425.000	22.425.000	0	0 %
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	78.592.036	78.592.036	0	0 %
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	307.125.000	307.125.000	0	0 %
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	99.237.500	99.237.500	0	0 %
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	21.584.375	21.584.375	0	0 %
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	67.653.125	67.653.125	0	0 %
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000	852.000.000	0	0 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000	252.000.000	0	0 %
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000	252.000.000	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000	600.000.000	0	0 %
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000	600.000.000	0	0 %
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	6.416.208.000	6.416.208.000	0	0 %
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	6.416.208.000	6.416.208.000	0	0 %
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	6.416.208.000	6.416.208.000	0	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.641.802.218	573.752.087.518	(214.889.714.700)	27 %
5.1.02.01	Belanja Barang	85.576.061.892	85.816.791.471	240.729.579	0 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	85.506.851.892	85.747.581.471	240.729.579	0 %
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	206.710.740	203.454.740	(3.256.000)	2 %
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	718.904.252	718.656.752	(247.500)	0 %
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.744.294.406	8.744.294.185	(221)	0 %
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	43.560.000	43.560.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	881.855.134	881.855.134	0	0 %
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	24.378.000	24.378.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	43.894.500	43.126.500	(768.000)	2 %
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	22.238.900.914	22.284.758.114	45.857.200	0 %
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	43.870.000	43.870.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.694.000	1.084.000	(1.610.000)	60 %
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.609.673.019	5.718.102.119	108.429.100	2 %
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.960.295.600	1.930.756.600	(29.539.000)	2 %
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.982.528.687	4.020.613.187	38.084.500	1 %
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	495.390.000	492.950.000	(2.440.000)	0 %
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.439.849.067	2.410.333.067	(29.516.000)	1 %
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	782.935.454	784.533.954	1.598.500	0 %
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	485.929.450	488.185.450	2.256.000	0 %
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	22.687.000	22.687.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	877.750.000	869.500.000	(8.250.000)	1 %
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.005.939.432	2.041.650.432	35.711.000	2 %
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.598.444.652	4.598.444.652	0	0 %
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.813.148.565	1.813.148.565	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.778.939.540	1.778.939.540	0	0 %
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	359.912.200	359.912.200	0	0 %
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	137.612.500	137.612.500	0	0 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.997.725.330	19.094.920.330	97.195.000	1 %
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.417.697.500	3.421.372.500	3.675.000	0 %
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	244.897.200	231.982.200	(12.915.000)	5 %
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	159.075.000	159.075.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	7.600.000	7.600.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	241.700.000	241.700.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	106.685.000	103.150.000	(3.535.000)	3 %
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	11.200.000	11.200.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	37.500.000	37.500.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	77.000.000	77.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	142.722.750	142.722.750	0	0 %
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	6.500.000	6.500.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	235.000.000	235.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	927.027.000	927.027.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	263.300.000	263.300.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	206.625.000	206.625.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	114.500.000	114.500.000	0	0 %
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	69.210.000	69.210.000	0	0 %
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	6.010.000	6.010.000	0	0 %
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	56.000.000	56.000.000	0	0 %
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	7.200.000	7.200.000	0	0 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	237.451.682.044	237.434.252.597	(17.429.447)	0 %
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	174.559.916.434	174.370.365.155	(189.551.279)	0 %
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.805.410.100	6.998.560.100	193.150.000	3 %
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.365.524.000	3.251.274.000	(114.250.000)	3 %
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	144.800.000	144.800.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	88.495.000	88.495.000	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	377.050.000	377.800.000	750.000	0 %
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	137.700.000	119.000.000	(18.700.000)	14 %
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	207.600.000	207.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	8.000.000	8.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	5.746.650.000	5.746.650.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.727.400.000	1.600.300.000	(127.100.000)	7 %
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	25.081.000.000	25.081.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	14.736.190.720	14.713.990.720	(22.200.000)	0 %
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	261.401.500	276.169.000	14.767.500	6 %
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	11.250.000	10.750.000	(500.000)	4 %
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.791.420.000	3.791.420.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.024.950.000	1.570.950.000	(454.000.000)	22 %
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	312.000.000	727.600.000	415.600.000	133 %
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.025.250.000	1.015.250.000	(10.000.000)	1 %
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	219.700.000	219.700.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	88.900.000	88.900.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	365.911.500	365.911.500	0	0 %
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	56.400.000	56.400.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	744.850.000	744.850.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.396.430.000	45.368.480.000	(27.950.000)	0 %
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	936.390.000	926.790.000	(9.600.000)	1 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.550.943.000	2.490.943.000	(60.000.000)	2 %
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.714.776.000	10.703.576.000	(11.200.000)	0 %
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.824.493.101	2.810.229.101	(14.264.000)	1 %
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.196.250.000	3.233.000.000	36.750.000	1 %
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	118.750.000	118.750.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	5.208.000	5.208.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	306.650.000	310.650.000	4.000.000	1 %
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	30.150.000	34.000.000	3.850.000	13 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	562.400.000	561.900.000	(500.000)	0 %
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	174.846.050	181.846.942	7.000.892	4 %
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	61.425.000	93.825.000	32.400.000	53 %
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	275.360.000	275.360.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.372.900.100	6.417.100.100	44.200.000	1 %
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	423.182.900	344.715.400	(78.467.500)	19 %
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	226.081.038	226.194.959	113.921	0 %
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.655.250.000	1.655.250.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.589.890.680	4.596.340.680	6.450.000	0 %
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	494.584.570	494.584.570	0	0 %
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.004.245.344	1.003.779.744	(465.600)	0 %
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	19.584.623.020	19.522.972.107	(61.650.913)	0 %
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	464.384.000	463.960.000	(424.000)	0 %
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.180.991.251	4.243.679.672	62.688.421	1 %
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	47.459.640	47.459.640	0	0 %
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.900.000	7.900.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	19.999.920	19.999.920	0	0 %
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	6.500.000	6.500.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	29.196.754.957	29.294.079.957	97.325.000	0 %
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	18.906.675.200	18.906.675.200	0	0 %
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.453.862.966	3.448.987.966	(4.875.000)	0 %
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.936.216.791	4.038.416.791	102.200.000	3 %
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	2.900.000.000	2.900.000.000	0	0 %
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	39.615.000	39.615.000	0	0 %
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	33.075.000	33.075.000	0	0 %
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	6.540.000	6.540.000	0	0 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.296.835.250	3.307.255.250	10.420.000	0 %
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	80.000.000	80.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	23.502.250	23.502.250	0	0 %
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	196.076.000	197.576.000	1.500.000	1 %

KABUPATEN BANJAR

RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	106.300.000	106.300.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.607.455.000	1.606.255.000	(1.200.000)	0 %
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	104.250.000	104.250.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	392.592.000	402.712.000	10.120.000	3 %
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	339.000.000	339.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	61.560.000	61.560.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	73.500.000	73.500.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0232	Belanja Sewa Alat Kedokteran Lainnya	200.000.000	200.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	98.000.000	98.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	9.600.000	9.600.000	0	0 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.078.286.000	2.095.692.832	17.406.832	1 %
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	560.550.000	571.356.832	10.806.832	2 %
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	61.875.000	68.475.000	6.600.000	11 %
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	886.071.000	886.071.000	0	0 %
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	204.650.000	204.650.000	0	0 %
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	129.500.000	129.500.000	0	0 %
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	35.640.000	35.640.000	0	0 %
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	200.000.000	200.000.000	0	0 %
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.000.000	3.000.000	0	0 %
5.1.02.02.06.0103	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	3.000.000	3.000.000	0	0 %
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	38.520.000	38.520.000	0	0 %
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	20.520.000	20.520.000	0	0 %
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	13.000.000	13.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.445.182.912	11.445.182.912	0	0 %
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	45.000.000	40.560.000	(4.440.000)	10 %
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.398.377.340	2.398.377.340	0	0 %
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa	1.022.840.000	1.022.840.000	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik				
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.374.078.644	1.374.078.644	0	0 %
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.313.599.500	1.313.599.500	0	0 %
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	411.920.000	411.920.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	240.000.000	240.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.420.132.707	1.420.132.707	0	0 %
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	125.350.000	129.790.000	4.440.000	4 %
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	541.406.500	541.406.500	0	0 %
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	732.284.655	732.284.655	0	0 %
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	239.593.566	239.593.566	0	0 %
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	350.000.000	350.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	1.230.600.000	1.230.600.000	0	0 %
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.985.511.780	3.985.511.780	0	0 %
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Transportasi	395.000.000	395.000.000	0	0 %
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	122.000.000	122.000.000	0	0 %
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.443.011.780	3.443.011.780	0	0 %
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	25.500.000	25.500.000	0	0 %
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.808.059.711	12.855.029.711	46.970.000	0 %
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.107.242.000	9.154.212.000	46.970.000	1 %
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	3.191.967.711	3.191.967.711	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	508.850.000	508.850.000	0	0 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	54.973.366.910	54.941.904.078	(31.462.832)	0 %
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	472.000.000	472.000.000	0	0 %
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	200.000.000	200.000.000	0	0 %
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	272.000.000	272.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.215.784.281	18.200.544.281	(15.240.000)	0 %
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	330.003.660	330.003.660	0	0 %
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	204.220.000	204.220.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.334.307.734	8.334.307.734	0	0 %
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.976.897.158	2.976.897.158	0	0 %
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	941.408.620	941.408.620	0	0 %
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.533.114.800	1.530.074.800	(3.040.000)	0 %
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	269.200.000	269.200.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	400.907.376	400.907.376	0	0 %
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	151.500.000	151.500.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	80.719.144	80.719.144	0	0 %
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	40.000.000	40.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	10.058.000	10.058.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2.394.000	2.394.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	481.176.260	478.426.260	(2.750.000)	1 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Kantor-Alat Kantor Lainnya				
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.790.000	10.790.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	533.374.944	543.474.944	10.100.000	2 %
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	798.000	798.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3.210.000	3.210.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	955.000	955.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	104.616.850	104.616.850	0	0 %
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	109.180.000	110.080.000	900.000	1 %
5.1.02.03.02.0339	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	0	0	0	0 %
5.1.02.03.02.0344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	200.199.960	200.199.960	0	0 %
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	45.000.000	45.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	150.000.000	150.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	42.240.000	39.180.000	(3.060.000)	7 %
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	650.737.885	642.707.885	(8.030.000)	1 %
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	526.034.480	523.274.480	(2.760.000)	1 %
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	53.322.610	46.722.610	(6.600.000)	12 %
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	102.000	102.000	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.02.0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	11.170.000	11.170.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	18.145.800	18.145.800	0	0 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.429.009.272	10.409.786.440	(19.222.832)	0 %
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.317.796.303	7.248.573.471	(69.222.832)	1 %
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.599.556.969	1.599.556.969	0	0 %
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	9.702.000	9.702.000	0	0 %
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	55.000.000	55.000.000	0	0 %
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	684.000.000	684.000.000	0	0 %
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	447.954.000	447.954.000	0	0 %
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	315.000.000	365.000.000	50.000.000	16 %
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.758.573.257	25.761.573.257	3.000.000	0 %
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	8.893.490.819	8.893.490.819	0	0 %
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	4.091.753.524	4.091.753.524	0	0 %
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.637.012.290	1.637.012.290	0	0 %
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	250.000.000	250.000.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	1.328.090.000	1.328.090.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.549.848.700	1.549.848.700	0	0 %
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan	283.000.000	283.000.000	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam				
5.1.02.03.04.0049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	2.110.000.000	2.110.000.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	860.000.000	860.000.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	200.000.000	203.000.000	3.000.000	2 %
5.1.02.03.04.0116	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	3.274.695.000	3.274.695.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	20.000.000	20.000.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.260.682.924	1.260.682.924	0	0 %
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	98.000.100	98.000.100	0	0 %
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	98.000.100	98.000.100	0	0 %
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	63.475.830.912	63.564.015.912	88.185.000	0 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	63.475.830.912	63.564.015.912	88.185.000	0 %
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.634.874.271	33.965.974.271	(668.900.000)	2 %
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.313.266.641	21.074.388.641	761.122.000	4 %
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.523.790.000	8.519.753.000	(4.037.000)	0 %
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.900.000	3.900.000	0	0 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	217.981.843.500	2.812.106.500	(215.169.737.000)	99 %
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	217.831.043.500	2.661.306.500	(215.169.737.000)	99 %
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.727.469.000	1.727.469.000	0	0 %
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	122.837.500	122.837.500	0	0 %
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	265.000.000	265.000.000	0	0 %
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	36.000.000	46.000.000	10.000.000	28 %
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	215.679.737.000	500.000.000	(215.179.737.000)	100 %
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	150.800.000	150.800.000	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	150.800.000	150.800.000	0	0 %
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	46.177.776.620	46.177.776.620	0	0 %
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	46.177.776.620	46.177.776.620	0	0 %
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	46.177.776.620	46.177.776.620	0	0 %
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.005.240.340	83.005.240.340	0	0 %
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.005.240.340	83.005.240.340	0	0 %
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.005.240.340	83.005.240.340	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	58.505.641.544	58.505.641.544	0	0 %
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	52.753.867.544	52.753.867.544	0	0 %
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	23.355.234.844	23.355.234.844	0	0 %
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.125.508.950	22.125.508.950	0	0 %
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.229.725.894	1.229.725.894	0	0 %
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	28.868.341.700	28.868.341.700	0	0 %
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.188.490.400	5.188.490.400	0	0 %
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	23.679.851.300	23.679.851.300	0	0 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	530.291.000	530.291.000	0	0 %
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	526.500.000	526.500.000	0	0 %
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.791.000	3.791.000	0	0 %
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	4.091.820.000	4.091.820.000	0	0 %
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.734.700.000	1.734.700.000	0	0 %
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas	1.734.700.000	1.734.700.000	0	0 %

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Swasta				
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.357.120.000	2.357.120.000	0	0 %
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.357.120.000	2.357.120.000	0	0 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.659.954.000	1.659.954.000	0	0 %
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.659.954.000	1.659.954.000	0	0 %
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.659.954.000	1.659.954.000	0	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.138.295.000	5.138.295.000	0	0 %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	329.020.000	329.020.000	0	0 %
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	329.020.000	329.020.000	0	0 %
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	329.020.000	329.020.000	0	0 %
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.519.000.000	819.000.000	(700.000.000)	46 %
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	97.500.000	97.500.000	0	0 %
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	97.500.000	97.500.000	0	0 %
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.421.500.000	721.500.000	(700.000.000)	49 %
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.421.500.000	721.500.000	(700.000.000)	49 %
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.000.000.000	2.700.000.000	700.000.000	35 %
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.000.000.000	2.700.000.000	700.000.000	35 %
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.000.000.000	2.700.000.000	700.000.000	35 %
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.290.275.000	1.290.275.000	0	0 %
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.290.275.000	1.290.275.000	0	0 %
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.290.275.000	1.290.275.000	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2	BELANJA MODAL	326.416.034.167	328.726.011.867	2.309.977.700	1 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.565.003.412	5.565.003.412	0	0 %
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	5.565.003.412	5.565.003.412	0	0 %
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	5.565.003.412	5.565.003.412	0	0 %
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	3.850.000.000	3.850.000.000	0	0 %
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.715.003.412	1.715.003.412	0	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.030.097.858	69.546.287.638	516.189.780	1 %
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	136.289.000	106.241.000	(30.048.000)	22 %
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	136.289.000	106.241.000	(30.048.000)	22 %
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	126.857.000	96.809.000	(30.048.000)	24 %
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	9.432.000	9.432.000	0	0 %
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	9.399.286.000	9.789.289.480	390.003.480	4 %
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	9.199.306.000	9.589.309.480	390.003.480	4 %
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	450.000.000	450.000.000	0	0 %
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	600.000.000	750.003.480	150.003.480	25 %
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.194.306.000	1.077.603.000	(116.703.000)	10 %
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	40.000.000	396.703.000	356.703.000	892 %
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	6.915.000.000	6.915.000.000	0	0 %
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	199.980.000	199.980.000	0	0 %
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	199.980.000	199.980.000	0	0 %
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	291.895.785	296.754.785	4.859.000	2 %
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	55.139.400	55.139.400	0	0 %
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	55.139.400	55.139.400	0	0 %
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	34.864.000	34.864.000	0	0 %
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	9.731.000	9.731.000	0	0 %
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	25.133.000	25.133.000	0	0 %
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	201.892.385	206.751.385	4.859.000	2 %
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0	4.859.000	4.859.000	100 %
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	198.500.000	198.500.000	0	0 %
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	3.392.385	3.392.385	0	0 %
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	42.909.000	42.909.000	0	0 %
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	42.909.000	42.909.000	0	0 %
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	24.909.000	24.909.000	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	18.000.000	18.000.000	0	0 %
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.037.622.496	4.113.996.996	76.374.500	2 %
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	769.910.496	816.605.496	46.695.000	6 %
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	373.838.750	371.801.750	(2.037.000)	1 %
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	396.071.746	444.803.746	48.732.000	12 %
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.647.185.000	2.682.887.500	35.702.500	1 %
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	428.299.000	439.322.000	11.023.000	3 %
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	60.286.000	60.286.000	0	0 %
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	841.260.000	841.260.000	0	0 %
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	45.661.000	45.661.000	0	0 %
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.164.779.000	1.160.418.500	(4.360.500)	0 %
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	106.900.000	135.940.000	29.040.000	27 %
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	620.527.000	614.504.000	(6.023.000)	1 %
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	121.964.000	121.964.000	0	0 %
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	363.626.000	363.626.000	0	0 %
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	134.937.000	128.914.000	(6.023.000)	4 %
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	101.709.500	144.988.500	43.279.000	43 %
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	101.709.500	144.988.500	43.279.000	43 %
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	18.751.500	18.751.500	0	0 %
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	82.958.000	95.356.000	12.398.000	15 %
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0	30.881.000	30.881.000	100 %
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	36.806.083.400	36.882.860.200	76.776.800	0 %
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	36.151.480.900	36.159.880.900	8.400.000	0 %
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	32.454.431.923	32.454.431.923	0	0 %
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.196.521.453	1.196.521.453	0	0 %
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	500.582.000	500.582.000	0	0 %
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0	8.400.000	8.400.000	100 %
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	855.923.216	855.923.216	0	0 %
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.144.022.308	1.144.022.308	0	0 %
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	654.602.500	722.979.300	68.376.800	10 %
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	654.602.500	722.979.300	68.376.800	10 %
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.708.987.920	3.708.987.920	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.284.967.920	2.284.967.920	0	0 %
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.284.967.920	2.284.967.920	0	0 %
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.299.600.000	1.299.600.000	0	0 %
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	1.299.600.000	1.299.600.000	0	0 %
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	24.420.000	24.420.000	0	0 %
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	24.420.000	24.420.000	0	0 %
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.760.965.477	5.715.910.477	(45.055.000)	1 %
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.470.456.257	4.446.053.257	(24.403.000)	1 %
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.443.906.257	4.419.503.257	(24.403.000)	1 %
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	26.550.000	26.550.000	0	0 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.290.509.220	1.269.857.220	(20.652.000)	2 %
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	870.975.220	850.323.220	(20.652.000)	2 %
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	417.534.000	417.534.000	0	0 %
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.000.000	2.000.000	0	0 %
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	36.000.000	36.000.000	0	0 %
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	30.000.000	30.000.000	0	0 %
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	30.000.000	30.000.000	0	0 %
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	6.000.000	6.000.000	0	0 %
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	6.000.000	6.000.000	0	0 %
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	406.649.000	406.649.000	0	0 %
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	406.649.000	406.649.000	0	0 %
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	406.649.000	406.649.000	0	0 %
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.595.700.280	6.595.700.280	0	0 %
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.595.700.280	6.595.700.280	0	0 %
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.595.700.280	6.595.700.280	0	0 %
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.706.000.000	1.706.000.000	0	0 %
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.706.000.000	1.706.000.000	0	0 %
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan	1.706.000.000	1.706.000.000	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Mesin BLUD				
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.577.560.362	74.739.534.962	161.974.600	0 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	73.894.220.102	74.056.194.702	161.974.600	0 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	70.752.937.377	70.938.370.477	185.433.100	0 %
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.998.999.964	2.998.999.964	0	0 %
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	2.733.483.009	2.733.483.009	0	0 %
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	17.741.060.000	17.741.060.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	28.448.256.244	28.448.256.244	0	0 %
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	995.000.000	995.000.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.341.346.000	1.341.346.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	624.488.000	624.488.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.681.092.274	15.704.550.774	23.458.500	0 %
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	45.900.000	45.900.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.311.886	305.286.486	161.974.600	113 %
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.141.282.725	3.117.824.225	(23.458.500)	1 %
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	99.178.950	99.178.950	0	0 %
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	550.000.000	550.000.000	0	0 %
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	2.492.103.775	2.468.645.275	(23.458.500)	1 %
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	30.000.000	30.000.000	0	0 %
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	30.000.000	30.000.000	0	0 %
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	30.000.000	30.000.000	0	0 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	296.750.100	296.750.100	0	0 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	296.750.100	296.750.100	0	0 %
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	70.280.000	70.280.000	0	0 %
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	126.470.100	126.470.100	0	0 %
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	356.590.160	356.590.160	0	0 %
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	356.590.160	356.590.160	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	356.590.160	356.590.160	0	0 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.200.419.435	177.832.232.755	1.631.813.320	1 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	157.377.526.540	158.827.939.860	1.450.413.320	1 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	114.492.659.522	115.922.044.217	1.429.384.695	1 %
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	43.800.345.600	43.800.345.600	0	0 %
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	42.275.829.627	43.358.309.322	1.082.479.695	3 %
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	15.302.768.491	15.302.768.491	0	0 %
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	13.113.715.804	13.460.620.804	346.905.000	3 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	42.884.867.018	42.905.895.643	21.028.625	0 %
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	35.386.857.018	35.386.857.018	0	0 %
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	7.498.010.000	7.498.010.000	0	0 %
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	0	21.028.625	21.028.625	100 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	17.951.372.895	18.062.772.895	111.400.000	1 %
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.404.349.500	10.515.749.500	111.400.000	1 %
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	10.404.349.500	10.515.749.500	111.400.000	1 %
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.244.061.000	2.244.061.000	0	0 %
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.244.061.000	2.244.061.000	0	0 %
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	5.302.962.395	5.302.962.395	0	0 %
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	5.302.962.395	5.302.962.395	0	0 %
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	871.520.000	941.520.000	70.000.000	8 %
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0	70.000.000	70.000.000	100 %
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	0	70.000.000	70.000.000	100 %
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	871.520.000	871.520.000	0	0 %
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	871.520.000	871.520.000	0	0 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.042.953.100	1.042.953.100	0	0 %
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	133.280.000	133.280.000	0	0 %
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	133.280.000	133.280.000	0	0 %
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	90.150.000	90.150.000	0	0 %
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	28.130.000	28.130.000	0	0 %
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	15.000.000	15.000.000	0	0 %
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	125.980.000	125.980.000	0	0 %
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	125.980.000	125.980.000	0	0 %
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	110.980.000	110.980.000	0	0 %

KABUPATEN BANJAR

RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	15.000.000	15.000.000	0	0 %
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	783.693.100	783.693.100	0	0 %
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	783.693.100	783.693.100	0	0 %
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	783.693.100	783.693.100	0	0 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.000.000.000	5.400.000.000	(2.600.000.000)	33 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000	5.400.000.000	(2.600.000.000)	33 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000	5.400.000.000	(2.600.000.000)	33 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000	5.400.000.000	(2.600.000.000)	33 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000	5.400.000.000	(2.600.000.000)	33 %
5.4	BELANJA TRANSFER	142.631.188.148	357.810.925.148	215.179.737.000	151 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.916.525.800	8.916.525.800	0	0 %
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.080.000.000	7.080.000.000	0	0 %
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.080.000.000	7.080.000.000	0	0 %
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.080.000.000	7.080.000.000	0	0 %
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.836.525.800	1.836.525.800	0	0 %
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.836.525.800	1.836.525.800	0	0 %
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.836.525.800	1.836.525.800	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	133.714.662.348	348.894.399.348	215.179.737.000	161 %
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	4.567.406.548	4.567.406.548	0	0 %
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	4.567.406.548	4.567.406.548	0	0 %
5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	4.567.406.548	4.567.406.548	0	0 %
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	129.147.255.800	344.326.992.800	215.179.737.000	167 %
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	129.147.255.800	129.147.255.800	0	0 %
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	129.147.255.800	129.147.255.800	0	0 %
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0	215.179.737.000	215.179.737.000	100 %
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	0	215.179.737.000	215.179.737.000	100 %
	Jumlah Belanja	2.249.762.820.652	2.249.762.820.652	0	0 %
	Total Surplus/(Defisit)	(88.643.617.224)	(88.643.617.224)	0	0 %

Lampiran I : Rancangan Peraturan Bupati Banjar
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	111.943.617.224	111.943.617.224	0	0 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	111.943.617.224	111.943.617.224	0	0 %
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	111.943.617.224	111.943.617.224	0	0 %
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	111.943.617.224	111.943.617.224	0	0 %
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	111.943.617.224	111.943.617.224	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	111.943.617.224	111.943.617.224	0	0 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.300.000.000	23.300.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	23.300.000.000	23.300.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	23.300.000.000	23.300.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	23.300.000.000	23.300.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	23.300.000.000	23.300.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	23.300.000.000	23.300.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	88.643.617.224	88.643.617.224	0	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Banjar

H. SAIDI MANSYUR